



DPRD Kepri Gelar Paripurna dan Halalbihalal di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran

Selasa, 15 Mei 2017 | 13.00.00 WIB | BATAMTODAY.COM Gallery Foto



Ketua DPRD menyerahkan laporan akhir Pansus kepada Gubernur Kepri



Gubernur bersama pimpinan DPRD Kepri



Ketua Pansus DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatof saat membacakan laporan akhir



Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS, Hanafi Ekra membacakan ayat suci Al Quran pada acara Halal Bihalal



Gubernur Kepri berjabat tangan dengan tamu serta FKPD yang hadir pada Paripurna laporan akhir Pansus DPRD tentang LHP BPK RI



Halal bihalal anggota DPRD Kepri pada hari pertama kerja usai libur Lebaran



Rapat paripurna laporan akhir Pansus DPRD Kepri tentang LHP BPK RI.



Sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri makan siang bersama saat halalbihalal.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) APBD 2016.

Dalam paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama (Rupatama) kantor DPRD Kepri, kawasan Dompok, Tanjungpinang, Senin (3/7/2017), juga disampaikan sejumlah rekomendasi Pansus terkait catatan penting BPK RI mengenai opini WTP yang diberikan kepada Pemprov Kepri.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan, dalam perjalanannya Pemprov Kepri sudah mendapat opini WTP dari BPK RI sebanyak tujuh kali berturut-turut. Dengan begitu, sesuai dengan UU yang berlaku, DPRD harus melakukan pembahasan mengenai pemberian opini tersebut. Oleh karena itu, DPRD membentuk Pansus untuk membahas raihan opini WTP tersebut.

"Maka hari ini, sama-sama kita dengarkan dengan seksama laporan akhir Pansus terhadap pembahasan LHP tahun anggaran 2016," ujarnya di hadapan peserta paripurna.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatof, saat penyampaian laporan akhirnya memaparkan catatan yang diberikan BPK RI dalam opini WTP Pemprov Kepri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mulai dari tahun 2013 sebanyak 6 catatan, tahun 2014 sejumlah 9 catatan, 2015 ada 10 catatan, dan di tahun 2016 meningkat menjadi 14 catatan. "Peningkatan catatan yang diberikan BPK seakan menjadi trend bagi Pemprov Kepri," katanya.

Untuk itu, Gubernur diminta menindaklanjuti hasil tersebut dengan mendesak masing-masing OPD membenahi segala kelemahan tersebut. "Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan tersebut diserahkan," tegas Ruslan.

Usai pelaksanaan paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan acara halalbihalal bersama anggota Dewan, OPD, serta FKPD Kepri. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan diisi dengan ceramah agama yang dilanjutkan dengan makan siang bersama.



Makan siang bersama para Kepala OPD Kepri saat kegiatan Halal Bihalal di Kantor DPRD Kepri.



Pembacaan hasil keputusan paripurna



Sejumlah anggota DPRD Kepri yang hadir dalam Paripurna laporan akhir Pansus LHP BPK RI.



Sejumlah anggota DPRD Kepri yang hadir pada paripurna laporan akhir Pansus tentang LHP BPK RI.



Sekda Kepri (kiri) bersama FKPD hadir dalam paripurna laporan akhir Pansus DPRD tentang LHP BPK RI.



Suasana halalbihalal di Kantor DPRD Kepri.

Abadikan Momen Spesial Anda di
BATAMTODAY.COM Gallery Foto

Untuk Pemesanan Hubungi :

Komplek Oriana Blok A. 02 No. 08, Batam Centre - Batam

Tlp : (0778) 7482-514, (0778) 5120-718 Email : redaksi@batamtoday.com